



LURAH SRIHARDONO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO

NOMOR 4 TAHUN 2022

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARDONO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) yang merupakan penjabaran dari RPJM Des;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 Nomor 37);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2022 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3)
14. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Srihardono Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf honorer kalurahan dan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2021 Nomor 7);

17. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO

dan

LURAH SRIHARDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPKal Tahun 2023 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas kerja Pemerintahan Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2023 seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

RKP Kalurahan Tahun 2023 berisi rencana program/kegiatan pemerintah Kalurahan pada tahun 2023 yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024.

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Lurah.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Srihardono

Pada tanggal 29 September 2022

LURAH SRIHARDONO



AWALUDIN

Diundangkan di Srihardono

Pada tanggal 29 September 2022

Carik Srihardono



KHOZIMATUL LUTHFIAH

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2022 NOMOR 04
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON
PUNDONG KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(10/Srihardono/2022)

LAMPIRAN :
PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

**URAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARDONO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI :

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan
 - D. Visi dan Misi Kalurahan
- BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
 - B. Kebijakan Keuangan Kalurahan
- BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
- A. Evaluasi Pelaksanaan Program Rkp-Kal Tahun Lalu
- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023
- A. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

B. DASAR HUKUM

RKP Kalurahan Srihardono Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 Nomor 37);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2022 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3)
14. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Srihardono Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf honorer kalurahan dan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 8);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKP Kalurahan Srihardono Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan.
2. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan Kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Srihardono tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Srihardono tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Srihardono tahun 2023 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Srihardono yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Kalurahan tahun 2023.

D. VISI DAN MISI KALURAHAN

1. Visi

Visi Lurah Kalurahan Srihardono untuk enam tahun mendatang (2019-2024) adalah *“Terwujudnya Kalurahan Srihardono Yang sehat, cerdas, sejahtera dan bermartabat”*

2. Misi

Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat dioperasionalkan untuk mewujudkan Visi, dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kalurahan Srihardono, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Srihardono adalah.

Misi Kalurahan Srihardono dalam RPJMDes Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- ✓ Mewujudkan Pemerintah Kalurahan Srihardono yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- ✓ Mengembangkan sector pertanian dan sector usaha industry kecil yang berwawasan lingkungan.
- ✓ Meningkatkan Srihardono menuju tatanan masyarakat yang adil, makmur, aman dan tertib.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH

Kalurahan Srihardono terletak di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas administrasi Kalurahan adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kalurahan Patalan dan Kalurahan Canden Kap. Jetis
Sebelah Selatan : Kalurahan Seloharjo dan Kalurahan Panjangrejo
Sebelah Barat : Kalurahan Panjangrejo dan Kalurahan Sumbermulyo
Sebelah Timur : Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri

Luas wilayah Kalurahan Srihardono sekitar 610.575 Ha. Kalurahan Srihardono terdiri dari 17 pedukuhan terbagi dalam 103 Rukun Tetangga. Secara administrasi Kalurahan terdiri dari 17 Pedukuhan. Adapun nama-nama Dusun adalah sebagai berikut:

1	Sawah	10	Nangsri
2	Candi	11	Klisat
3	Monggang	12	Tulung
4	Tangkil	13	Gulon
5	Pundong	14	Jonggrangan
6	Baran	15	Paten
7	Piring	16	Pranti
8	Ganjuran	17	Potrobayan
9	Seyegan		

Jarak Kalurahan dan waktu tempuh dari tempat terpenting

No	Jarak dari Kalurahan ke	Jarak (km)	Waktu tempuh (Jam)
1	Jarak ke Kapanewon	0,5	0,1
2	Jarak ke Kabupaten	8	0,2
3	Jarak Ke Provinsi	25	0,45

Kependudukan :

Data kependudukan bersumber dari Dinas kependudukan dan catatan sipil. Jumlah penduduk 13.513 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga: 4.261 KK, penduduk laki-laki 6.938 jiwa, penduduk perempuan 6.575 jiwa. Penduduk Kalurahan Srihardono mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani dan buruh lainnya.

Adapun untuk kondisi geografis wilayah Kalurahan Srihardono adalah sebagai berikut :

Topografi

Kalurahan Srihardono terletak di pertemuan dua Sungai besar, Sungai Opak dan sungai Oyo, sepanjang aliran sungai diikuti deretan perbukitan dari Kalurahan Sriharjo dan Kalurahan Selopamioro. Kondisi Topografi berupa dataran rendah

Hidrologi

Kalurahan Srihardono di sebelah timur dilalui oleh sungai besar Sungai Opak dan sungai Oyo, dan di sebelah barat Kalurahan dilalui sungai winongo. Aliran sungai-sungai tersebut mengalir ke Samudra Hindia. Debit sungai cukup melimpah untuk mengairi lahan pertanian di wilayah Desa Srihardono.

Geologi

Wilayah Kalurahan Srihardono secara umum merupakan morfologi berupa daratan yang terdiri dari dataran banjir dan endapan sungai. Pembentukan morfologi di wilayah Kalurahan Srihardono dipengaruhi oleh aktivitas Sungai opak dan sungai Oyo pada ribuan tahun yang lalu.

Iklm, cuaca, dan suhu udara

Kalurahan srihardono termasuk beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara rata-rata 28-30⁰ C, curah hujan 3100mm/Th.

POTENSI DESA

1. POTENSI PARIWISATA

Obyek Wisata Dan Bumi Perkemahan Sri Opak

Letak : Dusun Nangsri

Pengelola : warga Dusun Nangsri

Fasilitas : flaying fox, spot selfi, gazebo, pendopo pertemuan, mck 14 unit, lahan perkemahan 2 ha, kapasitas berkemah 400 orang.

Sirkuit Off Road Dan Arena Camping Potrobayan

Letak : Dusun Potrobayan

Pengelola : warga Dusun Potrobayan

Fasilitas : lahan sirkuit off road 7 ha, mck 2 unit

Obyek Wisata Monumen Gempa Potrobayan

Letak : Dusun Potrobayan

Pengelola : warga Dusun Potrobayan

Fasilitas : spot selfi, view memory monumen gempa

Obyek Wisata Opak Zoo

Letak : Dusun Pranti

Pengelola : Warga Dusun Pranti

Fasilitas : Mini loka Zoo, spot selfi, kolam renang, organ tunggal, tempat pertemuan, rumah pohon, perahu dayung, MCK 4 unit, Mushola, wahana mandi bola, Pameran Kerajinan , wisata andong

2. POTENSI OLAHAN MAKANAN TRADISIONAL

1) Mie des (mie ndeso) dan mie pentil

Kelompok usaha :

1. Sri oca

Alamat : Tulung, Srihardono

Jumlah Pengrajin : 23 Pengrajin

Ketua Kelompok : Bu Wardhani

Produk Unggulan : Mie Des Kering Kemasan

Omset : 20 Kg/ Bulan

Fasilitas : Mesin Pengering Mie

2) Sri loka

Alamat : Tulung, Srihardono

Jumlah Pengrajin : 15 Pengrajin

Ketua Kelompok : Bu Darmi

Produk : Mie Des Dengan Aneka Bumbu Rasa

Omset : 30 Kg/Bulan

3. POTENSI BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1) Bank Sampah “Berkah “Gulon

- o Bank sampah “Berkah” berdiri tgl 12 Januari 2017, dikuatkan dengan adanya naskah pengukuhan dari JPSP Bantul.
- o Jumlah anggota 100 nasabah
- o Telah mendapat surat pernyataan dari pemerintah desa bahwa sudah ada bank sampah di Dusun Gulon.

Kegiatan :

- o Sosialisasi kesadaran pengelolaan sampah rumah tangga di balai desa.
- o Mengikuti berbagai lomba.
- o Memilah sampah .
- o Membuat kerajinan dari daur ulang.
- o Menerima berbagai pesanan kerajinan.
- o Ikut gropyok sampah dipantai.
- o Menerima setoran sampah setiap hari
- o Koordinasi pengurus seminggu sekali dan setiap diperlukan.

Hasil kerajinan

- o Di buat kerajinan seperti kalung, bunga, bros dll
- o Setelah dipilah dijual ke pengepul

2) KSM Srihardono Bersih

- KSM srihardono bersih didirikan pada pertengahan 2017 oleh kelompok swadaya masyarakat.
- Jumlah anggota 400 nasabah
- Telah mendapat surat pernyataan dari pemerintah desa bahwa sudah ada rumah pilah sampah KSM “Srihardono Bersih” di dusun baran.

Kegiatan :

- Memilah sampah .
- Membuat pupuk kompos dari daur ulang sampah organik
- Mengambil sampah pada nasabah setiap hari
- Memasarkan produk
- Koordinasi pengurus setiap diperlukan.

Hasil produk

- Di buat pupuk kompos

Aset yang dimiliki:

- Gedung
- Mobil pick up
- Sepeda motor bak

4. ASET DESA PENUNJANG USAHA EKONOMI

Adapun asset desa penunjang usaha ekonomi antara lain:

- ❖ Lahan tanah kas Kalurahan untuk pendirian bangunan usaha
- ❖ Kios Kalurahan yang sudah disewakan 10 unit
- ❖ Kios mie des 6 unit
- ❖ Rumah produksi mie des
- ❖ Gedung pertemuan

B. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Pada tahun 2023 Pemerintah Kalurahan Srihardono merencanakan APB Kalurahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) sebagai berikut :

Kebijakan Pendapatan Kalurahan

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)
A. Pendapatan Asli Desa		
1. Hasil aset Desa	277.200.000	200.000.000
2. lain-lain pendapatan asli desa yang sah	9.000.000	9.000.000
B. Pendapatan Transfer		
1. Dana Desa	1.419.266.000	1.419.266.000

2. Alokasi Dana Desa	1.321.887.150	1.321.887.150
3. Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah	254.585.582	254.585.582
4. Bantuan Keuangan Kabupaten	1.015.000.000	1.275.000.000
5. Bantuan Keuangan provinsi	63.000.000	-
Jumlah perkiraan pendapatan	4.359.938.732	4.468.069.750

Kebijakan Belanja Desa

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)
A. Belanja Desa		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2.076.752.615	2.005.850.750
Bidang Pembangunan Desa	1.423.982.300	1.978.295.000
Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa	319.275.000	259.285.000
Bidang Pemberdayaan Desa	48.800.000	329.738.000
Bidang keadaan darurat, bencana dan mendesak desa	625.800.000	71.200.000
Jumlah perkiraan belanja	4.713.960.915	4.644.368.750
Sisa Lebih/Kurang	354.022.183	176.299.000

Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)
Pembiayaan		
Penanaman modal BUMDes	50.000.000	25.000.000
Jumlah perkiraan pembiayaan	50.000.000	25.000.000

BAB III
EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKP-KAL TAHUN LALU

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 terhadap APBKal Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kegiatan yang di dalam RKP belum ada parameternya dikarenakan adanya beberapa hal, yaitu :

1. Munculnya Kebijakan Penggunaan DD yang muncul setelah perkal RKP ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 mengharuskan formasi penggunaan DD TA 2022 digunakan untuk 40% BLT, 8% untuk penanganan Covid-19 dan 20% untuk ketahanan pangan. Sedangkan di RKP Kalurahan yang telah ditetapkan belum mencantumkan kegiatan tersebut sesuai dengan presentase yang di diharapkan. Sehingga dalam penyusunan APBKal harus disesuaikan dengan kebijakan walaupun sedikit berbeda dengan RKP yang telah ditetapkan.
2. Munculnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 yang ditetapkan setelah RKP Kalurahan ditetapkan yang mana dalam Peraturan tersebut disebutkan terkait tunjangan masa kerja dan honor honor yang lain bagi Perangkat Kalurahan yang sebelumnya belum diatur. Sehingga dalam penyusunan APBKal harus memunculkan parameter kegiatan baru yang sebelumnya belum ada dalam RKP Kalurahan yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci untuk parameter kegiatan dan besaran anggaran antara yang ditetapkan dalam RKP Kalurahan dan realisasi dalam APBKal TA 2022 adalah sebagai berikut:

<i>Usulan Jenis Kegiatan</i>	<i>Jumlah dalam RKP</i>	<i>Sumber</i>	<i>Jumlah realisasi RAB dlm APBKal</i>	<i>Sumber Dana</i>
BIDANG PEMERINTAHAN				
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	53,328,000	ADD	57,532,800	ADD
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	816,480,000	ADD	876,111,000	ADD
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	55,868,400	ADD	40,912,800	ADD/PAD
Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	616,386,600	ADD	486,451,515	PAD, PBH,ADD,DLL
Penyediaan Tunjangan Bamuskal	103,520,000	ADD	114,320,000	ADD/PAD
Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	23,319,000	ADD	10,515,000	ADD
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66,245,000	ADD	64,375,000	PAD
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	1,620,000	ADD	900,000	PAD

<i>Usulan Jenis Kegiatan</i>	<i>Jumlah Dalam RKP</i>	<i>Sumber Dana</i>	<i>Jumlah Realisasi dalam APBKal</i>	<i>Sumber Dana</i>
Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	109,758,000	PAD/PBH	119,048,700	PAD
Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	58,900,000	PAD/PBH	39,060,000	PAD
Tunjangan masa kerja			83,430,000	PBH
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	46,500,000	ADD/PAD/PBH	3,000,000	PBH
Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan	4,730,000	ADD/PAD/PBH	5,455,000	DLL
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)	99,480,000	ADD/PAD/PBH/PBP	0	
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	5,450,000	DDS	6,500,000	DDS
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	2,500,000	DDS	0	
Pengelolaan administrasi & kearsipan pemerintah Desa	0		5,100,000	PBH
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	54,120,000	DDS	35,700,000	DDS/PBH
Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	15,650,000	DDS	14,900,000	DDS
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan /Pembahasan APBKal (Reguler)	7,025,000	DDS/ADD/PAD/PBH	4,250,000	DLL/PBH/PAD
Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musduk, rembug kalurahan Non Reguler)	12,325,000	DDS	4,875,000	DDS
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/ RKPKal dll)	12,825,000	ADD/PAD/PBH	8,545,000	PAD
Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)	5,250,000	ADD/PAD/PBH	2,590,000	DLL
Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/ Perkalakal selain Perencanaan/Keuangan)	16,600,000	ADD/PAD/PBH	0	
Penyusunan Laporan Lurah, LPPK dan Informasi Kepada Masyarakat	1,500,000	ADD/PAD/PBH	390,000	DLL/PAD
Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	16,850,000	DDS	24,425,000	DDS
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	5,000,000	ADD/PAD/PBH	12,250,000	PBH
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	18,500,000	PAD/PBH	3,675,000	PAD
Lain-lain sub bidang pertanahan	50,000,000	PAD/PBH	0	
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	71,590,800	PBH	52,440,800	PBH
BIDANG PEMBANGUNAN				
Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	63,170,000	DDS	47,200,000	DDS/PBK
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma	152,336,000	DDS/ PPBMP	50,000,000	PBK
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	20,700,000	DDS	0	

<i>Usulan Jenis Kegiatan</i>	<i>Jumlah Dalam RKP</i>	<i>Sumber Dana</i>	<i>Jumlah Realisasi dalam APBKal</i>	<i>Sumber Dana</i>
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63,660,000	DDS	108,705,000	DDS/PBK
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12,725,000	DDS	6,600,000	DDS
Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan		DDS	5,400,000	DDS
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	68,000,000	PPBMP	0	
Pembinaan Kampung KB	20,589,000	DDS	6,100,000	DDS
Penanganan/ Pemulihan Balita Gizi Buruk/ Stunting	15,500,000	DDS	5,250,000	DDS
Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	21,888,000	DDS	3,300,000	DDS
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	628,804,200	DDS/PBK/ PPBMP	305,990,000	PBK
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	45,784,000	DDS/PBK	124,672,300	DDS
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)	41,075,000	DDS/PBK	0	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	695,466,000	DDS/PPBMP	291,205,000	PBK
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	36,780,000	PBK	0	
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen /batas Desa)			102,880,000	PAD/PBP
Pemeliharaan sanitasi pemukiman			138,650,000	PBK
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	174,687,000	DDS	174,687,000	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	40,695,000	DDS	53,735,000	DDS
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	35,000,000	DDS	37,730,000	PBK
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	36,385,000	DDS/PPBMP	15,500,000	PBK
Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	5,255,000	DDS	4,685,000	DDS
Pembuatan pengelolaan jaringan instansi komunikasi dan informasi lokal kalurahan	6,300,000	DDS	0	
Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	76,000,000	PPBMP	108,380,000	PBK/DDS
BIDANG PEMBINAAN				
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	23,100,000	DDS	21,350,000	PBH
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	38,336,000	DDS	16,986,000	DDS
Penguatan Desa Aman Covid - 19	73,500,000	DDS	113,730,000	DDS
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	2,250,000	PAD/PBH	0	

<i>Usulan Jenis Kegiatan</i>	<i>Jumlah Dalam RKP</i>	<i>Sumber Dana</i>	<i>Jumlah Realisasi dalam APBKal</i>	<i>Sumber Dana</i>
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	64,130,000	PAD/PBH	0	
Pembinaan bidang keagamaan			16,500,000	PAD
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	4,500,000	DDS	13,120,000	DDS
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	9,900,000	DDS	65,450,000	DDS/PAD
Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan	32,216,000	ADD/PBH/PAD	10,765,000	PBH/PAD
Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	23,550,000	ADD/PBH/PAD	3,725,000	PBH
Pembinaan PKK	44,675,000	ADD/PBH/PAD	6,525,000	PBH
BIDANG PEMBERDAYAAN				
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	29,120,000	DDS	10,500,000	DDS
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	9,730,000	DDS	10,297,000	DDS
Fasilitasi Kelompok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan	45,305,000	DDS	25,265,000	DDS
Pengembangan usaha hasil pertanian/peternakan			108,350,000	DDS
Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan	3,200,000	DDS	1,950,000	DDS
Peningkatan Kapasitas Staf/ Tenaga Honorer Kalurahan/ Kader Pembangunan Masyarakat	2,050,000	DDS	1,975,000	DDS
Pelatihan/pembinaan/pendampingan penerapan produksi pangan sehat dan baik bagi UMKM			5,475,000	DDS
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7,030,000	DDS	0	
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	12,000,000	DDS	0	
Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/ Remaja Belum Bekerja/ Keluarga (dipilih)	24,695,000	DDS	0	
Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM	3,970,000	DDS	0	
Pembentukan BUM Kalurahan	3,600,000	DDS	0	
Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	3,080,000	DDS	3,155,000	DDS
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50,000,000	DDS	50,000,000	
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Kalurahan	277,244,000	DDS	128,098,000	DDS
Pembentukan/ Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	9,422,500	DDS	24,120,000	PBK/DDS
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA & KEADAAN MENDESAK DESA				
Penanganan Keadaan darurat			3,000,000	DDS
Pemberian Bantuan Langsung Tunai	61,200,000	DDS	622,800,000	DDS
JUMLAH	5,469,923,500		4,713,960,915	

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada regulasi yang mengatur prioritas kegiatan tahun 2023 dan berbagai permasalahan yang ada dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat. Keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan menjadi hal yang mutlak agar pembangunan menjadi tepat sasaran.

A. PAGU INDIKATIF ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA KALURAHAN

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan keuangan Khusus kabupaten dan provinsi dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi. Perkiraan anggaran atau pagu indikatif kami masih mengacu pada pagu indikatif tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 karena pagu indikatif tahun 2023 belum keluar dari Kabupaten.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Pada RKP Kalurahan tahun 2023, Kalurahan Srihardono mengacu pada Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (PPBMP) yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 tahun 2022. Yang mana program tersebut ditujukan untuk masing-masing pedukuhan dengan besaran 50 juta tiap dusun dengan acuan kegiatan di 4 bidang yaitu pendidikan PAUD, kesehatan, lingkungan hidup dan kabupaten layak anak.

Selain itu dalam penetapan prioritas program juga menggunakan skala prioritas Kalurahan bukan skala prioritas pedukuhan mengingat pada tahun 2023 arah kebijakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan yang disinkronkan dengan prioritas nasional, utamanya untuk :

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. dana operasional pemerintah desa
- c. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa;

d. memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa.

Berkaitan dengan hal di atas, secara rinci prioritas program dan kegiatan yang dirumuskan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. dibidang Pemerintahan
2. dibidang Pembangunan
3. dibidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. dibidang Pemberdayaan Masyarakat
5. dibidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

Belanja yang tercantum dalam RKPKal ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023. Adapun perkiraan Rencana Kegiatan Belanja adalah dalam tabel sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-Kalurahan)
TAHUN : 2022

KALURAHAN : SRIHARDONO
 KAPANEWON : PUNDONG
 KABUPATEN : BANTUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan								Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	ADD	DD	PAD	PBH	BKK	BKK PPBMP	dll	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Srihardono	1 orang	Lurah	12 bulan	57,532,800	57,532,800							V			Kaur Tata Laksana	
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Srihardono	24 orang	Pamong	12 bulan	874,872,000	874,872,000								V			Kaur Tata Laksana
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Srihardono	38 orang	Lurah dan Pamong	12 bulan	19,984,800	19,984,800								V			Kaur Tata Laksana

4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkap	Srihardono	6 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	453,501,650	369,801,150	42,000,000	29,846,300	9,404,200			2,450,000	V		Kaur Tata Laksana
5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Srihardono	9 orang	Bamuskal	12 bulan	114,320,000	114,320,000							V		Kaur Pangripta
6	Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam)	Srihardono	1 Paket	Bamuskal	12 bulan	10,515,000	10,515,000							V		Kaur Pangripta
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Srihardono	103 RT	RT	12 bulan	64,375,000	64,375,000							V		Jagabaya
8	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	Srihardono	9 orang	Bamuskal	12 bulan	630,000	630,000							V		Kaur Pangripta
9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Srihardono	38 Orang	Pemerintah Kalurahan, Bamuskal	12 bulan	120,098,700			120,098,700					V		Kaur Tata Laksana
10	Tunjangan Masa Kerja	Srihardono	25 orang	Lurah dan Pamong	12 bulan	82,200,000				82,200,000						Kaur Tata Laksana
11	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Srihardono	2 unit	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	-			-					V		Kaur Tata Laksana
12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	10,025,000				10,025,000				V		Kaur Tata Laksana

13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung sarana kantor	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	11,550,000			11,550,000							
	Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	2 kali	10,600,000		10,600,000								
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Srihardono	4 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	33,900,000		33,900,000					V			Kamituwa
15	Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	Srihardono	1 kegiatan	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	-		-					V			Kamituwa
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	4,800,000		4,800,000					V			Kaur Pangripta
17	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	11,050,000		11,050,000					V			Kaur Pangripta
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	10,375,000		10,375,000					V			Kaur Pangripta
19	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	Srihardono	2 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	2,800,000		2,800,000					V			Kaur Pangripta
20	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	16,850,000		16,850,000					V			Kaur Tata Laksana
21	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	Srihardono	2 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	10,850,000			10,850,000				V			Kaur Tata Laksana

		2 2	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan BPD	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	16,280,000			16,280,000					V		Jagabaya	
		2 3	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Dalam Lomdes	Srihardono	2 Paket	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	12,800,000		12,800,000								Jagabaya	
		2 4	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Srihardono	2 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	4,750,000			4,750,000					V		Jagabaya	
		2 5	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Srihardono	1 Paket	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	51,190,800			51,190,800					V		Jagabaya	
		Jumlah Per Bidang 1						2,005,850,750											
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Srihardono	1 Paket	Guru, PAUD, TK, PMT	12 bulan	41,400,000		41,400,000						V		Kamituwa	
		2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Srihardono	1 Paket	Masyarakat	12 bulan	3,000,000		3,000,000						V		Kamituwa	
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarpras/APE untuk PAUD/TK/TPA milik Desa	Srihardono	5 Paket	Guru, PAUD, TK, PMT	12 bulan	50,185,000		28,000,000			22,185,000			V		Ulu-Ulu	
		4	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Srihardono	17 Paket	Masyarakat	12 bulan	379,568,000		82,280,000			297,288,000			V		Kamituwa	

5	Penanggula ngan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Sri har don o	17 KPM	Masyar akat	12 bula n	61,200,000		61,200,000							V			Kamitu wa	
		2	Penanggulangan bencana	Sri har don o	1 Paket	Masyar akat	12 bula n	10,000,000		10,000,000								V		Jagaba ya	
	Pembiayaa n	1	Modal bumdes	Sri har don o	1 Paket	Masyar akat	12 bula n	25,000,000		25,000,000								V		Jagaba ya	
Jumlah Per Bidang 5								96,200,000													
JUMLAH TOTAL								4,669,368,750	1,512,030,750	1,417,468,000	200.000.000	255,185,000	425,000,000	850,000,000	9,685,000						

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (DURKP) TAHUN 2024

KAPANEWON : PUNDONG

KALURAHAN : SRIHARDONO

NO	BIDANG	KEGIATAN	UP	B/L/R	INDIKATOR KERJA		LOKASI	Volume	Satuan	Anggaran				Keterangan
					OUTPUT	OUTCOME				APBD	APBD Prov	APBN	Lainnya	
1	Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Gorong-gorong jalan kabupaten	1	B	Terbangunnya saluran gorong-gorong	Mengurangi genangan air di jalan raya	Jl. Mangun Negoro No. Ruas K.314 (dari Pundong-Seloharjo)	120	Meter	200,000,000				
2	Lingkungan Hidup	Pembangunan Taman Terbuka Hijau Ramah Anak	2	B	Terbangunnya Taman terbuka hijau ramah anak	Tersedianya area publik yang ramah anak	Lapangan seyegan, Pertigaan Depan Koramil	2	unit	200,000,000				
3	Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman	Rehab avour Ngetuk (tegal kanan)	3	R	Terbangunnya avour	Terbangunnya avour yang lebih baik	Ngetuk, Tulung	300	Meter	300,000,000				
4	Kesabangpol	Pembinaan Kelompok Jaga Warga	4	B	Terseleenggaranya kegiatan pembinaan Kelompok jaga warga untuk 60 orang	Kelompok jaga warga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik	Kalurahan Srihardono	1	Paket	20,000,000				
5	Pertanian	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	5	B	Terseleenggaranya pelatihan untuk 40 orang anggota KWT	Meningkatnya kesejahteraan anggota KWT	Kalurahan Srihardono	1	Paket	25,000,000				
6	Pariwisata	Pentas seni	6	B	Terseleenggaranya kegiatan pentas seni yang melibatkan seniman lokal	Kelompok seni semakin maju	Kalurahan Srihardono	1	Paket	20,000,000				

BAB V

PENUTUP

Sebagai salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Kalurahan dan merupakan dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan maka dokumen RKP-Kal ini menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas pembangunan. Dan Oleh karena itu dokumen RKP Kal ini merupakan arah kebijakan pembangunan jangka pendek Kalurahan yang mengacu pada kebijakan pembangunan jangka panjang. Maka kualitas RKP-Kal menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

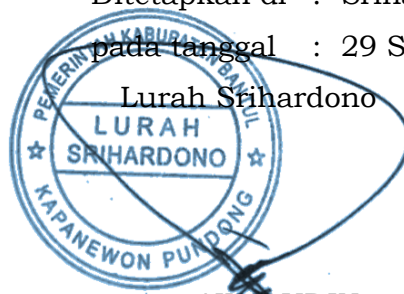
Selain itu mengacu pada peran Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat kalurahan yang saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP kalurahan yang benar-benar partisipatif dan mengacu kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat kalurahan , maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di : Srihardono

pada tanggal : 29 September 2022

Lurah Srihardono



AWALUDIN